

## TAJUK RENCANA

### Menjaga Keseimbangan, Dilemma Kepala Daerah

**DUNIA** politik gaduh, menyusul munculnya Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam instruksi bertanggal 20 Februari 2025 disebutkan agar para kepala daerah yang diusung partai berlabang banteng dengan moncong putih tersebut, tidak mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang 21-28 Februari, sesuai pelantikan di Jakarta. Instruksi lewat surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 muncul dengan mencermati dinamika politik, khususnya setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (KR, 22/2).

Instruksi menghadirkan sejumlah tanya. Kemana loyalitas kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, kepada pemberi suara atau partai? Sejauhmana batas independensi kepala daerah? Adakah ada agenda tersembunyi yang lebih besar dari peristiwa ini? Apakah hal ini mempertegas bila hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri kian renggang?

Retreat pascapelantikan kepala daerah sebagaimana disebut Presiden juga Mendagri hendaknya jangan dilihat sekadar militeristik. Karena lewat pembekalan ini terjalin silaturahmi, *sharing*, terjalinya jejaring sekaligus koordinasi pusat dan daerah. Dapat dikatakan, retreat memiliki peranan penting apalagi bagi kepala daerah yang baru, untuk 5 tahun ke depan. Apalagi di tengah keluhan layanan public di banyak daerah yang masih buruk atau di tengah sebrek persoalan tatakelola pemerintah di sejumlah daerah.

Maka hadirnya Instruksi Ketum DPP PDI-P cukup menjadi dilemma bagi para kepala daerah tersebut. Padahal dalam sekolah partai mengikuti arahan Megawati terdapat 177 orang kader PDIP yang saat ini mendapat amanat rakyat menjadi kepala daerah. Dan di antara itu ada 55 orang termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Sleman Harda Kiswara sudah siap di Kota Magelang, namun tidak mengikuti retreat. Mereka menunggu instruksi lanjutan Ketum DPP PDI-P, terus melakukan komunikasi aktif dan stand

*by commander call.*  
Disinilah sejatinya wibawa antara Megawati dan Prabowo diperlihatkan. Dapat dikatakan, instruksi ini luar biasa menguji loyalitas petugas partai, apakah akan *manut* ketua partai atau agenda nasional. Dan karena dipilih rakyat dalam pemilu yang sah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penting bagi kepala daerah untuk menjaga keseimbangan antara loyalitas terhadap partai dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin publik. Bagaimana mestinya loyalitas kepada partai setelah ada 'pimpinan' baru, mengingat mereka dipilih rakyat dan dilantik presiden?

Menjaga keseimbangan terhadap partai dan tanggungjawab sebagai pemimpin public harus dilakukan kepala daerah. Meski dalam realitas kepala daerah tidaklah selalu diwakafkan untuk rakyat, daerah, bangsa dan negara. Bahkan posisi mereka sering berada dalam tarik menarik : loyal terhadap partai dan kepentingan pusat.

Melihat tarik menarik, mestinya instruksi tidak dilihat sekadar larangan mengikuti retreat. Bangsa ini dapat melihat bahwa sebagai partai yang pernah berkuasa, PDI-P masih tetap ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan sekarang ini. Instruksi juga dapat dilihat sebagai peringatan kepada Presiden Prabowo, agar tidak ada kekuatan eksternal yang mencoba 'cawe-cawe' dan menggoyang PDI-P. Bahkan banyak pihak melihat, apa yang terjadi tidak sekadar persaingan Megawati dengan Prabowo tetapi sejatinya kompetisi Megawati - Prabowo - Jokowi. Komentar Jokowi kala ditanya media, dinilai *bak mengail di air keruh.*

Sikap bijak Megawati Soekarnoputri, untuk mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah mengamankan suaranya pada kader-kader PDI-P tetap ditunggu. Jangan sampai kegaduhan politik ini menghadirkan ketidapastian dan dapat memperburuk citra Indonesia. Di sisi lain, kepala daerah pun harus segera menyusun strategi agar kebijakan pusat tidak sulit dilaksanakan di daerah nanti. Tanpa mengurangi loyalitasnya pada partai dan tetap menjaga keseimbangan untuk kesejahteraan rakyat. □f

## Melindungi Anak Bermedsos



**KEKHAWA-TIRAN** terhadap dampak media sosial (medsos) pada anak terus meningkat. Negara-negara di Amerika, Eropa, dan Asia menyadari

dampak negatif medsos bagi anak dan telah melakukan langkah regulasi pembatasan penggunaan medsos. Presiden Prabowo Subianto pada 13 Januari 2025 meminta Menkomdi Meutya Hafid menyiapkan aturan terkait batas usia mengakses medsos. Meutya usai diterima Presiden menyatakan akan mengeluarkan aturan terkait batas usia mengakses medsos sambil menanti pembentukan undang-undang. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) tengah digodog.

Sejumlah negara merespons bahaya medsos untuk anak. Di Florida, AS, mulai 1 Januari 2025 anak di bawah usia 14 tahun dilarang memiliki akun medsos. Anak usia 14-15 tahun boleh memiliki akun medsos seizin orangtua. Pada 28 November 2024, Parlemen Australia menanggapi kekhawatiran dampak medsos terhadap kesehatan mental anak dengan mengubah UU Keamanan Daring, mengharuskan *user* berusia minimal 16 tahun jika ingin membuat akun medsos. UU itu melarang anak mengakses *Youtube*, *TikTok*, *Instagram*, *Snapchat*, *Facebook*, *Reddit*. Platform yang tak patuh akan didenda hingga 50 juta dolar Australia (Rp 508 miliar).

**Kompleksitas di Indonesia**  
Di Indonesia pembatasan usia penggunaan medsos dipandang penting karena berdasarkan laporan BPS tahun 2021 menunjukkan, 89% anak usia lima tahun ke atas mengakses internet untuk medsos dan hanya 33% mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah. BPS juga merilis, 80,32% pelajar usia 5-24 tahun menggunakan internet pada 2024. Sebanyak 67,65% mengakses medsos. Survei APJII terhadap 8.700 responden pada tahun lalu juga menemukan 48% anak di bawah usia 12 tahun mengakses internet, sebagian menggunakan *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok*. UNICEF (2023) mengungkapkan 89% anak di Indonesia

### Imam Anshori Saleh

menggunakan Internet setiap hari dengan durasi 5 jam 24 menit. Anak-anak itu menghadapi risiko signifikan, termasuk terpapar konten tidak pantas, perundungan siber serta eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring. Penelitian atas 510 anak itu mendapati 42% anak merasa tak nyaman terhadap pengalaman daring mereka, 48% anak pernah dirundung anak lain, dan 50,3% anak pernah melihat konten seksual.

Kita sebenarnya sudah memiliki aturan batasan usia lewat Revisi UU



KR-JOKO SANTOSO

No.11/2008 tentang ITE, diubah lewat UU No.19/2016 dan UU No.1/2024 yang memandatkan kewajiban untuk memberi perlindungan terhadap anak *user* sistem elektronik. Ketentuan ini ada di Pasal 16A dan 16B yang mengatur data anak sebagai bagian dari data pribadi yang spesifik-sensitif dan memberi kewenangan provider menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi. Pasal 25 mengharuskan provider melindungi data anak berusia di bawah 17 tahun. Ayat (1) pasal itu menegaskan adanya klausul pemrosesan data anak secara khusus, bahkan wajib mendapat persetujuan orang tua/wali, yang disebut pada ayat (2). Ada yang perlu diperhatikan dalam RPP TKPAPSE tersebut, yakni batasan usia anak belum diatur tegas sebab sejumlah UU yang mengatur batas usia anak berbeda-beda. Contoh, UU No. 24/2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2006 tentang Adminduk menyebut WNI yang

sudah berusia 17 tahun dapat memiliki KTP dan mengikuti Pemilu. Berarti pemerintah menempatkan penduduk usia 17 tahun tidak lagi sebagai anak, sehingga pemrosesan data tak dianggap sebagai data pribadi anak. Sementara UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak mengatur batas usia anak 18 tahun, KUH Perdata mengatur usia 21 tahun dewasa dan cakap secara hukum.

Relevan rekomendasi *Bahsul Masail Qanuniah NU* awal Februari 2025 yang agar dalam penyusunan RPP, Kemenkomdi, menimbang dengan matang dan komprehensif efek positif dan negatif medsos bagi anak-anak. Di satu sisi, anak-anak dapat belajar keterampilan digital yang diperlukan di dunia modern, seperti berbagi informasi, mengelola profil, dan memahami etika online. Medsos juga dapat mendorong kreativitas: beberapa platform medsos mendukung ekspresi kreatif. Anak-anak dapat berbagi karya seni, video pendek, dan cerita, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi visual. Di sisi lain penggunaan medsos berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan. Anak-anak sangat rentan terpapar konten yang tidak cocok untuk usia mereka, seperti kekerasan atau konten seksual. Ini dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional mereka.

Dengan mempertimbangkan *masalah* dan *mafsadah* internet, hukumnya wajib membatasi bahkan melarang penggunaan medsos bagi anak di bawah umur karena realitas menunjukkan bahayanya lebih besar ketimbang manfaatnya. □f

*\*) Dr Imam Anshori Saleh SH MH anggota DPR RI 2004-2009, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI 2010-2015.*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

## Politik Keris Presiden Prabowo



### PRESIDEN

Prabowo Subianto memberikan keris emas kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal itu disampaikan pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, belum lama ini.

Prabowo memang tidak memberikan keterangan apa maksudnya. Mengapa memilih keris dan jenis keris apa maknanya, namun keris Prabowo Subianto kepada Joko Widodo (Jokowi) memiliki makna simbolis yang mendalam. Keris tersebut dapat diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang dalam konteks budaya dan politik Indonesia.

Sebenarnya Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada 2008 lalu.

Dalam budaya Jawa, keris bukan hanya sekadar senjata. Melainkan memiliki makna mendalam yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya. Namun seringkali juga dianggap sebagai simbol status sosial dan kekuasaan. Pada zaman dahulu, keris menjadi bagian tak terpisahkan dari atribut seorang raja atau bangsawan. Sebuah Keris yang memiliki kualitas tinggi, baik dari segi bahan maupun pamor (motif pada bilah keris), mencerminkan kedudukan tinggi.

Senjata ini adalah bagian dari seni tradisional Jawa yang sangat adiluhung. Pembuatan keris melibatkan sosok empu yang punya keterampilan tinggi dalam menempa logam, mengukir, dan menghias. Tak jarang bahan keris dipercaya adalah batu meteor, sebab itu juga seringkali menjadi objek koleksi karena nilai estetikanya yang tinggi.

Beberapa orang percaya bahwa senjata dapat membantu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Keris dianggap memiliki energi yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan pemiliknya. Oleh karena itu, perawatan keris seringkali melibatkan

### Octo Lampito

ritual-ritual tertentu untuk menjaga energinya tetap positif.

Dalam kepercayaan Jawa, keris diyakini memiliki kekuatan spiritual atau magis. Kekuatan ini bisa berasal dari bahan pembuatan, proses pembuatan, atau "isi" (khodam) di dalamnya. Keris dengan kekuatan spiritual sering dianggap dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, atau bahkan membantu mencapai tujuan tertentu. Keris seringkali menjadi pusaka keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi simbol penghormatan kepada leluhur.

Bentuk bilah keris yang berlekuk (luk) adalah ciri khas yang membedakannya dari senjata lain. Jumlah luk memiliki makna simbolis tersendiri. Motif pada bilah keris yang terbentuk dari lapisan-lapisan logam yang berbeda.

Karena itulah, menjadi sorotan menarik ketika keris emas diberikan untuk Jokowi. Dalam konteks hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi, pemberian keris dapat dilihat sebagai simbol penerimaan dan rekonsiliasi setelah persaingan yang ketat dalam dua pemilihan presiden sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut telah melupakan perbedaan dan bersatu demi kepentingan bangsa.

Senjata tradisional tersebut juga merupakan simbol kepemimpinan dan kekuasaan dalam budaya Jawa. Selain adalah warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi. Pemberian keris juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melestarikan dan menghargai warisan budaya Indonesia.

Karena itulah, pemberian tersebut juga dapat dilihat sebagai simbol harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa presiden Prabowo memiliki visi yang sama dengan

presiden sebelumnya untuk kemajuan Indonesia.

Pemberian ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan politik pasca-pemilihan presiden, sekaligus menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut telah bersatu demi kepentingan bangsa. Keris dapat melambangkan kesediaan untuk bekerja sama dan membangun negara bersama. Hal tersebut sekaligus menjawab bahwa Presiden Prabowo dan Jokowi masih kompak. Apalagi setelah sebelumnya berhembus kabar jika Prabowo akan meninggalkan Jokowi.

Warangka dan keris adalah bagian tak terpisahkan, dan merupakan bagian integral dari keindahan keris secara keseluruhan. Warangka memiliki fungsi praktis, estetis, dan simbolis, sehingga keris dan warangka harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Secara keseluruhan, pemberian tersebut mencerminkan hubungan yang erat antara kedua tokoh, penghargaan atas kepemimpinan sebelumnya, dan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Interpretasi yang tepat dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu dan konteks politik yang lebih luas. □f

*\*) Dr Octo Lampito MPd, adalah wartawan harian Kedaulatan Rakyat.*

## Kedaulatan Rakyat

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPENS/USIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.  
**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.  
**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.  
**Direktur Keuangan:** Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.  
**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.  
**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.  
**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyating.

**Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting).  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).  
Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .  
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang:** Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.  
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.  
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslihkah. Wakil : Asrul Sani.  
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Pojok KR

Kemenag pastikan seluruh kuota haji khusus terisi  
-- Semangat berhaji yang luar biasa  
\*\*\*  
Retreat kepala daerah tingkatkan kapasitas kepemimpinan  
-- Juga kualitas kepemimpinan  
\*\*\*  
Di Sukoharjo masih ada 20 sapi terjangkit PMK  
-- Percepat vaksinasi

